TUGAS ETIKA

**MEMBUAT OPINI / TULISAN MENGENAI REALITAS HIDUP SEHARI-HARI
YANG DISOROTI DARI ANEKA TEORI ETIKA YANG TERMUAT DALAM BUKU
FILSAFAT MORAL**

Disusun Oleh:

Vano Halal Marga Pratama

NIM : 51418052

FAKULTAS EKONOMI/BISNIS

JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN

MADIUN 2019

ABSTRAK

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi atau pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Dilihat dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi mencakup unsur-unsur yaitu perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan pidana korupsi biasanya dilakukan oleh para pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau sepihak. Tujuan dari paper ini adalah untuk menganalisis kasus korupsi kasus BLBI, Sjamjul Nursalim dan Syafruddin Arsyad Rugikan Negara Rp 4,8 Triliun. Teori yang digunakan dalam pembahasan paper ini adalah sudut pandang Etika, *Actus Hominis* dan *Actus Humanus*, Asas Tahu Mau Bebas, dan Hati Nurani.

Kata Kunci : Korupsi, Melawan Hukum, Tindakan Pidana Korupsi, Politik, *Actus Hominis* dan *Actus Humanus*.

Kasus BLBI, Sjamjul Nursalim dan Syafruddin Arsyad Rugikan Negara Rp 4,8 Triliun

A. Pendahuluan

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi atau pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Tindakan pidana korupsi biasanya dilakukan oleh para pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta instansi pemerintah lainnya. Menurut Pengertian Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan wewenang yang dimiliki maupun kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan tindakan yang sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia seperti menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, melambatnya pembangunan infrastruktur serta meningkatkan utang negara dan menurunnya pendapatan negara. Korupsi mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan tipu daya muslihat, ketidakjujuran, pemanfaatan kedudukan untuk penyelewengan, dan penyuapan. Korupsi bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan, korupsi bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, juga bukan faktor kebetulan, melainkan sebuah tindakan yang telah terencana dan dilandasi niat atau motivasi tertentu.

Kasus korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia mengakibatkan tidak keseimbangan perekonomian negara, menghambat investasi asing dan melemahnya pertumbuhan ekonomi, yang paling utama adalah pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat, serta jumlah pengangguran dan angka kemiskinan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

B. STUDI KASUS

Sumber :

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/19594301/kasus-blbi-sjamjul-nursalim-dan-syafruddin-arsyad-rugikan-negara-rp-48>

Penulis : Christoforus Ristianto

Editor : Diamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan perkara terpidana mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temanggung. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menjelaskan, konstruksi perkara tersebut bermula saat BPPN dan Sjamsul menandatangani penyelesaian pengambil alihan pengelolaan BDNI melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) pada 21 September 1998.

Dalam MSAA tersebut, lanjut Laode, telah disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI. Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) sepenuhnya, tersangka Sjamsul bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai ataupun penyerahan aset. "Jumlah kewajiban Sjamsul Nursalim selaku PSP BDNI sebesar Rp 47.258.000.000.000," kata Laode, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2019).

Ia menuturkan, kewajiban tersebut dikurangi dengan penyerahan aset sebesar Rp 18.850.000.000.000, termasuk pinjaman kepada petani atau petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Laode menyebut aset senilai Rp 4,8 triliun itu dipresentasikan Sjamsul sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah. "Namun, setelah dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet, sehingga dipandang terjadi misrepresentasi," ucapnya.

Atas hasil tersebut, kemudian BPPN mengirimkan surat kepada Sjamsul yang berisikan pemegang saham BDNI telah melakukan misrepresntasi. BPPN juga meminta Sjamsul menambah aset untuk mengganti kerugian. Namun, tersangka Sjamsul menolak.

Mintakan "White Off"

Selanjutnya, seperti diungkapkan Laode, tersangka Itjih yang merupakan istri Sjamsul mengadakan rapat dengan BPPN pada Oktober 2003. Hal itu dilakukan agar rencana penghapusan piutang petambak dipasena dapat berjalan lancar.

Dalam rapat tersebut, Itjih juga menyampaikan bahwa suaminya tidak melakukan misrepresentasi. "Kemudian pada bulan Februari 2004, dilakukan rapat kabinet terbatas (Ratas) yang intinya BPPN melaporkan dan meminta pada Presiden RI saat itu agar sisa utang petani tambak dilakukan white off (dihapusbukukan). Namun, BPPN tidak menyampaikan misrepresentasi yang dilakukan Sjamsul," tuturnya.

Hasil ratas tersebut tidak memberikan keputusan dan persetujuan terhadap usulan white off dari BPPN. Tetapi, Laode menyebut, terpidana Syafruddin Arsyad Temenggung dan tersangka Itjih telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang berisikan para pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang diatur dalam MSAA, pada 12 April 2004.

Kemudian, terpidana Syafruddin juga telah menandatangani surat perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada tersangka Sjamsul, pada 26 April 2004. Laode menyebut, hal itu mengakibatkan hak tagih atas utang petambak dispena menjadi hilang atau dihapus.

Selanjutnya, lanjut Laode, BPPN menyerahkan pertanggung jawaban aset pada Kemenkeu yang berisikan hak tagih atau utang petambak pada PT DCD dan LT WM pada 30 April 2004. Hal itu yang menyebabkan Dirjen Anggaran Kemenkeu menyerahkan hak tagih kepada PT Perusahaan pengelola Aset (PPA).

"Kemudian PT PPA melakukan penjualan hak tagih utang petambak plasma senilai Rp 220 miliar. Padahal nilai kewajiban SJN (Sjamsul) yang seharusnya diterima negara adalah Rp 4,8 triliun," ujar Laode.

Akibatnya, KPK menduga nilai kerugian negara pada perkara itu sebesar Rp 4,58 triliun. Dalam perkara ini, KPK juga akan memaksimalkan upaya asset recovery agar uang yang dikorupsi dapat kembali kepada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara.

Atas perbuatannya, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Panggilan pemeriksaan

Dalam kasus ini, KPK juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada tersangka Sjamsul dan Itjih sebanyak tiga kali. Panggilan tersebut dilakukan pada Oktober 2018 sebanyak dua kali, dan Desember 2018 satu kali. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan tersebut.

Laode mengatakan, pihaknya telah mengirimkan informasi dimulainya penyidikan pada tersangka Sjamsul dan Itjih di tiga lokasi berbeda di Singapura dan satu lokasi di Indonesia, pada 17 Mei 2019. Adapun tiga lokasi di Singapura itu ialah The Oxley, Cluny Road, dan Head Office of Giti Tire Pte. Ltd. Selain itu, satu lokasi yang ada di Indonesia ialah rumah tersangka yang ada di daerah Simprug, Grogol Selatan, Kebayoran Lama.

"KPK ingatkan pada para tersangka jika memiliki iktikad baik agar bersikap kooperatif dengan proses hukum ini," ujar Laode.

C. LANDASAN TEORI

1. ETIKA

Manusia dari kodratnya merupakan makhluk berpikir, ingin mengenal, menggagas, merefleksikan dirinya, sesamanya, Tuhannya, hidup kesehariannya, lingkungan dunia kehadirannya, asal dan tujuan keberadaannya, dan segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya. Keinginan rasional ini merupakan bagian kodrati keberadaan dan kehadiran manusia. Karakter rasional kehadiran manusia merupakan suatu kewajiban, kenormalan, ke-natural-an.

Objek material dari Etika adalah segala hal yang bersangkutan paut dengan tingkah laku manusia. Objek formal yang dipakai tentu adalah filsafat (dengan sumbangan ilmu-ilmu lain sejauh berkaitan, misal: sosiologi, antropologi budaya, dan teologi).

Etika berbeda dengan etiket. Jika etika berkaitan dengan moral, etiket hanya tali-menali dengan sopan santun. Belajar etiket berarti bagaimana bertindak dalam cara-cara yang santun; sedangkan belajar etika berarti bagaimana bertindak baik. Lapangan etiket berkisar pada tindakan/cara-cara bertindak dari sudut pandang eksternal, dan tidak menyentuh kedalaman tindakan secara utuh. Etika menunjuk pada tindakan manusia secara menyeluruh. Artinya, etika tidak hanya bersoal jawab dengan cetusan tindakan lahiriah manusia, melainkan juga memotivasi yang mendasarinya dan aneka dimensi lain yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Etika, pendek kata, mengantar orang pada bagaimana menjadi baik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafah tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi, jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusiawi ini bukan tingkah laku yang tidak ada artinya, tetapi yang mengejar nilai-nilai kebaikan.

2. TINDAKAN MANUSIA

A. ACTUS HOMINIS

Tindakan manusia sebagai suatu gerakan belaka, dimana manusia berada pada level yang paling rendah yaitu level vegetatif (level tindakan yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang gerakannya melulu ditentukan oleh desakan natural). Actus hominis adalah tindakan fisik yang dimiliki manusia, seperti makan, tidur, minum, berlari, dan seterusnya. Dalam taraf ini tindakan manusia tidak berbeda dengan tingkah laku yang dimiliki oleh binatang, bahkan manusia bertindak persis dengan binatang. Manusia tidak mengedepankan kemanusiaan dalam bertindak, maka penilaian etis pun tidak dapat dikenakan kepadanya.

B. ACTUS HUMANUS

TAHU, MAU & BEBAS:

Actus Humanus adalah syarat perbuatan moral. Artinya, etika berada dalam lapangan perbuatan manusiawi. Perbuatan moral adalah perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik atau buruk dan terpuji atau tercela. Selain itu, perbuatan moral berada dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab manusia. Actus Humanus menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk rasional. Rasionalitaslah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Penilaian moral tidak bisa dikenakan pada perbuatan manusia yang rasionalitasnya tidak jalan.

Kebebasan berarti tidak ada pemaksaan, tapi kebebasan juga menyangkut pilihan – pilihan yang ada didepannya. Kebebasan mengandaikan dua hal, yaitu tahu dan mau. Artinya, hanya apabila manusia itu mengetahui dan menghendaki, ia disebut manusia bebas dan dengan demikian ia bertanggung jawab diatasnya. Kehilangan salah satu syarat ini, manusia tidak dapat bertanggung jawab diatas tindakannya.

D. ANALISA MASALAH DALAM TEORI FILSAFAT MORAL

Terjadi lagi, Kasus BLBI, Sjamjul Nursalim dan Syafruddin Arsyad Rugikan Negara Rp 4,8 Triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam kasus tersebut sangat melanggar nilai-nilai Etika, Secara umum dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafah tentang tindakan manusia sebagai manusia. Suatu tindakan itu mempunyai nilai etis bila dilakukan oleh manusia dan dalam kerangka manusiawi, jelas bahwa etika itu berurusan secara langsung dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Tingkah laku manusiawi ini bukan tingkah laku yang tidak ada artinya, tetapi yang mengejar nilai-nilai kebaikan. Dalam teori Etika ini, tindakan tersebut sangat tidak relevan, karena kita sebagai manusia, harus berperilaku baik, jujur dan menghargai orang lain.

Serta nilai-nilai etika, mengajarkan kita untuk bertindak baik serta mempunyai akal budi, namun dalam kasus tersebut sama sekali tidak mencerminkan hal itu, dalam kasus tindak pidana korupsi, dilakukan oleh pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), jelas menunjukkan bahwa pelaku tersebut tidak memiliki kejujuran, akal budi serta tidak mengedepankan kemanusiaannya dalam bertindak, mereka hanya mencari keuntungan demi memperkaya diri sendiri.

Teori *actus hominis* menjelaskan tindakan fisik yang dimiliki manusia, seperti makan, tidur, minum, berlari, dan seterusnya. Dan teori ini menggambarkan bahwa tindakan manusia tidak Berbeda dengan tingkah laku yang dimiliki Binatang. Dalam Kasus BLBI, Sjamjul Nursalim dan Syafruddin Arsyad Rugikan Negara Rp 4,8 Triliun, jelas tidak mereka tidak mengedepankan kemanusiaan dalam bertindak dan bertingkah laku, padahal pelaku tersebut adalah pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), sudah pasti Gaji mereka tinggi, memang pada dasarnya sifat manusia yang serakah dan selalu kurang puas terhadap apa yang telah dimiliki, mereka hanya mementingkan diri sendiri untuk memperkaya diri mereka.

Teori selanjutnya adalah *actus humanus*, teori menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk rasional, jadi bahwa pelaku korupsi tersebut tidak memiliki sikap rasionalitas, karena tindakannya untuk memperkaya diri sendiri dengan korupsi sangat tidak mencerminkan sikap rasional, karena Rasionalitaslah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Penilaian moral tidak bisa dikenakan pada perbuatan

manusia yang rasionalitasnya tidak jalan. Merujuk pada perbuatan moral, perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik atau buruk dan terpuji atau tercela. Jelas pelaku korupsi tersebut juga tidak memiliki moral yang baik dan akal budi. Serta berperilaku buruk, tidak terpuji dan tercela karena tindakan korupsi yang merugikan negara senilai Rp 4,8 Triliun.

Teori selanjutnya yang berkaitan dengan tindakan manusia adalah Tahu, Mau & Bebas. Bahwa pelaku korupsi Sjamjul Nursalim dan Syafruddin Arsyad mengetahui “TAHU” bahwa melakukan tindakan pidana korupsi adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, mereka “Tahu” tetapi masih melakukan tindakan korupsi, sangat jelas mereka tidak bisa mengenali dengan baik siapa dirinya dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. “MAU” mereka dengan sengaja Mau melakukan tindakan korupsi tindak pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “MAU” juga merupakan syarat esensial kebebasan, untuk melakukan kehendak apa yang diinginkan tanpa adanya unsur paksaan. Dan yang terakhir “BEBAS” kebebasan di miliki oleh semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang jadi pertanyaan apakah kita bebas melakukan semuanya dengan sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Akan tetapi kebebasan juga menyangkut pilihan-pilihan yang ada didepan kita. Dengan adanya kebebasan kita bisa memilih atau membedakan mana yang baik untuk di lakukan dan buruk.

E. KESIMPULAN

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi atau pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Dilihat dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi mencakup unsur-unsur yaitu perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Kasus BLBI, Sjamjul Nursalim dan Syafruddin Arsyad Rugikan Negara Rp 4,8 Triliun. Sehingga sangat merugikan negara dan merusak citra para pejabat yang memerintah di Indonesia. Hal ini harus cepat ditangani agar tindakan pidana korupsi berkurang bahkan tidak terjadi sama sekali Indonesia, maka pemerintah harus memprioritaskan hal tersebut dan harus ada hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku korupsi agar benar-benar jera dan tidak mengulangnya lagi.

SUMBER REFERENSI

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/19594301/kasus-blbi-sjamjul-nursalim-dan-syafruddin-arsyad-rugikan-negara-rp-48>

(Diakses tanggal 12 Juni 2019)

Dewantara, Agustinus. "Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia)." (2017).

Dewantara, A. (2017). Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia).

DEWANTARA, Agustinus. Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia). 2017.